



(RENCANA KERJA)

# RENJA 2023

DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN LUWU

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 54 Tahun 2019, tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa OPD menyusun (Rencana Kerja) Renja OPD. Renja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) OPD dan Pemerintah Daerah (RKPD).

(Rencana Kerja) Renja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Tahun 2023 disusun sebagai arahan pelaksanaan tupoksi seluruh jajaran Dinas Perikanan Kabupaten Luwu yang berisi program dan kegiatan sesuai tupoksi yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 dan berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja.

Semoga (Rencana Kerja) Renja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Tahun 2023 ini bermanfaat dalam rangka meningkatkan kinerja dan sebagai bahan perencanaan pembangunan terutama di bidang perikanan di Kabupaten Luwu pada masa sekarang dan yang akan datang.

Luwu, Juli 2022

Kepala Dinas Perikanan  
Kabupaten Luwu



K. BAHARUDDIN  
NIP. 19650903 199203 1 011

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah, perencanaan merupakan langkah awal untuk melaksanakan pengukuran kinerja instansi pemerintah dan salah satunya adalah (Rencana Kerja) Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan perencanaan tahunan dari Organisasi Perangkat daerah yang bersangkutan.

Sementara itu paralel dengan pembuatan Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki (Rencana Kerja) Renja OPD yang merupakan perencanaan tahunan dari OPD yang bersangkutan, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah, perencanaan merupakan langkah awal untuk melaksanakan pengukuran kinerja instansi pemerintah dan Renja adalah salah satunya. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu tahun 2022 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan OPD.

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Perikanan Kabupaten Luwu sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2023 ini menyusun Renja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu tahun 2023. Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Renja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu tahun 2023, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi Kabupaten Luwu tahun 2019 – 2024 sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Tahun 2019 – 2024 yaitu :

**“Kabupaten Luwu Yang Maju, Sejahtera Dan Mandiri Dalam Nuansa Religi”**

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran Dinas Perikanan Luwu Tahun 2019 – 2024 sesuai Misi ke-4 RPJMD kabupaten Luwu sebagai berikut : **“Pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan koperasi, usaha mikro kecil menengah dan perluasan lapangan kerja”**.

(Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Luwu tahun 2023, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu tahun 2023 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

## **1.2 Landasan Hukum**

Adapun Landasan Hukum yang digunakan dalam rangka penyusunan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu tahun 2023 ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/Permen-KP/2017 tentang Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan;
13. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PER-DJPT/2019 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Kegiatan Bantuan Premi Asuransi Nelayan;
14. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PER-DJPT/2019 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan;
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2016 Nomor 7);



16. Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2016 Nomor 122); Nomor 8 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019 – 2024;
17. Peraturan Bupati Luwu Nomor 131 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Luwu;
18. Peraturan Bupati Luwu Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Tahun 2021.
19. Peraturan Bupati Luwu Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Tahun 2019-2024
20. Peraturan Bupati Luwu Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemrintah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2023

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

RenjaDinas Perikanan Kabupaten Luwu tahun2023dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuatprogram dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukurpenilaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu dalammelaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2023.

Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan ( RENJA) Tahun2023Dinas Perikanan ini adalah :

- a. Sebagai perwujudan pertanggungjawaban tertulis dangambaran mengenai perencanaan pelaksanaan kegiatan,program, kebijaksanaan dalam mencapai sasaran dan tujuanpada tahun 2023.
- b. Sebagai alat untuk mengukur dan mengevaluasi tingkatkeberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan selama 1 (satu) tahun.
- c. Sebagai bahan acuan dalam rangka penyusunan/perencanaankegiatan pembangunan dan peningkatan kinerja instansiPemerintah pada tahun-tahun selanjutnya.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

**BAB I PENDAHULUAN**, pada bagian ini dijelaskan mengenaigambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD yang meliputilarat belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan sertasistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

## **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN Renja OPD TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD,**  
memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD,** berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD,** berisikan uraian mengenai : Se jauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- 2.4. Review terhadap**
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat,** dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan dan hasil pelaksanaan musrenbang kecamatan.

## **BAB III TUJUAN DAN SASARAN OPD**

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional,** telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD,** perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

**3.3. Program dan Kegiatan**, berisikan penjelasan mengenai :faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan.

#### **BAB IV DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif tahun 2023.

**BAB V PENUTUP**, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.



---

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Perikanan Kabupaten Luwu merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Luwu. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut (Rencana Kerja) RENJA Dinas Perikanan Kabupaten Luwu ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Luwu selama tahun 2022 dan perkiraan target tahun 2023. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

##### a. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

##### b. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Evaluasi dan analisis kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran serta evaluasi akuntabilitas keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu pada tahun anggaran 2022 dilakukan pada 4 program, 13 kegiatan dan 29 sub kegiatan.

**Evaluasi Program, Kegiatan dan Sasaran Tahun 2021**

Pencapaian misi strategis yang telah ditargetkan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Tahun 2021 tidak terlepas dari adanya dukungan dana yang telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Luwu. Sebagai bahan Akuntabilitas Keuangan dibawah ini disajikan Rekapitulasi Alokasi dan Realisasi penyerapan anggaran berdasarkan sasaran strategis guna mencapai tujuan, sasaran dan program sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Tahun 2021.

Sebagaimana yang telah dikemukakan tentang rencana Kinerja Dinas Perikanan pada tahun 2021 telah menetapkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai guna merealisasikan Tujuan yang tercakup dalam Program pada beberapa kegiatan dari anggaran yang tersedia sebesar Rp.7.546.208.828,- (Tujuh Milyar Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) berubah menjadi Rp.7.421.492.783,- (Tujuh Milyar Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) dimana perubahan tersebut disebabkan adanya Pandemi Covid-19 sehingga berdampak pada penurunan anggaran belanja Untuk mendukung program dan kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu dari jumlah anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 7.324.850.650 (Tujuh milyar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah).

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang mana dana tersebut merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam mencapai sasaran pembangunan. Tahun Anggaran 2021 Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Menganggarkan belanja langsung sebesar Rp. 3.918.310.249,- (Tiga Milyar Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Tiga Ratus Sepuluh ribu Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) dialokasikan untuk belanja Operasi sebesar 3.361.500.249 dan Belanja Modal 556.810.000 dengan Realisasi sebesar 3.883.072.218 yang terdiri dari belanja Operasi sebesar 3.329.899.454 dan belanja Modal terealisasi sebesar 553.172.764

Sedangkan Belanja tidak Langsung atau Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, Tahun anggaran 2021 Dinas Perikanan Kabupaten Luwu menganggarkan belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.503.182.534,- (Tiga Milyar Lima Ratus Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 3.441.776.432.

Evaluasi dan analisis kinerja kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu beserta indikatornya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Tahun 2021 telah melaksanakan 4 program, 14 kegiatan dan 25 sub kegiatan. Evaluasi pencapaian target kinerja perangkat daerah tahun 2020 berdasarkan Renja perangkat daerah tahun 2020 sebagaimana laporan evaluasi pencapaian kinerja dalam laporan evaluasi monev tahun 2020. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi anggaran dinas perikanan kabupaten luwu telah mencapai target kinerja sebesar 98,70%. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Tahun 2022 adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Kabupaten Luwu Tahun 2022 dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan yang direncanakan

## **1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

## **2. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**

- Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
- Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai 10 GT di wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan

dengan Ukuran Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

- Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat di usahakan dalam 1 daerah Kabupaten

### **3. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**

- Penerbitan Izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten
- Pemberdayaan Pembudidaya ikan kecil
- Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK)
- Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
- UPTD BBI AIR TAWAR

### **4. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**

- Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
- Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
- Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah kabupaten

Kondisi keberhasilan program dan kegiatan pada Dinas Perikanan Kabupaten Luwu disajikan pada tabel 2.1 yang disesuaikan dengan OPD dapat terlihat pada format tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1

**Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan  
Pencapaian Renstra Perangkat daerah Tahun 2021  
Kabupaten Luwu**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMEINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM ( <i>outcome</i> ) / KEGIATAN ( <i>output</i> )	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2021			Target Program/Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian (2022)	Perkiraan Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	$8 = \frac{(7/6) \times 100}{100}$	9	$10 = (5+7+9)$	$11 = (10/4)$
33.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan pemerintahan daerah								
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	100 %					100 %	0 %	
3.25.01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen renstra dan renja serta perubahan renstra dan renja yang disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	0 Dokumen	0
3.25.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	0 Dokumen	0
3.25.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA- SKPD yang disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	0 Dokumen	0

3.25.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	0 Dokumen	0
3.25.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	0 Dokumen	0
3.25.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100	4 Laporan	1 Laporan	25
3.25.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang disusun	5 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100	4 Dokumen	0 Dokumen	0
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	100 %		8 jenis	8 jenis	100	100 %	100 %	
3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangannya	552 OB		1.184 OB	1.184 OB		552 OB	309 OB	55
3.25.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1087 OB		2 Jenis	2 jenis		1087 OB	30 OB	27
3.25.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100 %					100 %	%	
3.25.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah pelaksana penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD dalam 1(satu) tahun	2 Laporan	12 bln/ 1 org pengurus barang, 12 bulan/ 1 org pengelola administrasi keuangan				2 Laporan	1 Laporan	50



3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pesentase ASN dengan predikat kinerja baik	1 %					1 %	%	
3.25.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut ( PDH )		1 Orang					1 Orang	1 Orang	100
3.25.01.2.05.02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	100 %		1 Orang		0	100 %	0 %	0
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	12 jenis					12 jenis	0 jenis	0
3.25.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/peerangan bangunan kantor	10 Unit					10 Unit	0 Unit	0
3.25.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Bulan	1 unit laptop, 2 unit printer , perbaikan 8 AC,	12 unit	0	0	12 Bulan	0 Bulan	0
3.25.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Bulan	1 tahun cetak penggandaan	1 tahun cetak penggandaan	1 tahun cetak penggandaan	100	12 Bulan	0 Bulan	0
3.25.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 Jenis	23 jenis surat kabar,	108 surat kabar,	108 surat kabar,	100	1 Jenis	0 Jenis	0
3.25.01..2.06.07	Penyediaan Bahan Material	Jumlah jenis / bahan material kebutuhan kantor yang disediakan	1 Bulan	1 tahun	25	25	100	1 Bulan	1 Bulan	100
3.25.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	300 OK	664 kotak makan minum rapat	160 kotak	160 kotak	100	300 OK	0 OK	0

3.25.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	400 OK	75 Perjalanan	162 OK	162 OK	100	400 OK	35 OK	8,75
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyelenggara penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa	100 %					100 %	0 %	
3.25.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat menyurat	jumlah penyedia jasa surat menyurat yang disediakan		12 Bulan /245 Materai	400	400	100			
3.25.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12 Bulan	12 bln/4 rek. Listrk/12 bln internet,	12 bln/4 rek. Listrk/12 bln internet,	12 bln/4 rek. Listrk/12 bln internet,	100	12 Bulan	5 Bulan	41
3.25.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	120 OB	864 OB	864 OB	864 OB	100	156 OB	60 OB	38
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%					41 %	0 %	0
3.25.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	Unit	12 bln/1 sopir, 3 STNK roda 4, 2 roda 2	12 bln/1 sopir, 2 STNK roda 4, 15 roda 2	12 bln/1 sopir, 2 STNK roda 4, 15 roda 2	100	17 Unit	1 Unit	5
3.25.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dilakukan pemeliharaan	unit/set	perbaikan 8 AC,	perbaikan 8 AC,	perbaikan 8 AC,	100	22 unit/set	0 unit/set	0
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP									
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah									

	Kabupaten/ Kota									
3.25.03.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan				1 dok	1 dok	100			100
3.25.03.2.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap		1 Dokumen							
3.25.03.2.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap			kapal 3 GT 1 Paket, Kapal 1 GT 3 paket, Pengadaan Perahu/Kapal Penangkapan Ikan Fiber 2 Paket, Pengadaan Rumpun 1 paket, Pembuatan Bagang apung / drum 1 paket, Pengadaan Jaring Millenium 2 paket	3 Paket Jaring Millenium, 1 paket pancing rawai, 3 kapal 1 GT, 4 Paket Coolbox,	3 Paket Jaring Millenium, 1 paket pancing rawai, 3 kapal 1 GT, 4 Paket Coolbox,	100	52 Kelompok	1 Kelompok	
3.25.03.2.02.01	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten									
3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil				1 paket kapal 3 GT, 1 Paket kapal 2 GT, 3 Paket kapal 1 GT	1 paket kapal 3 GT, 1 Paket kapal 2 GT,	40			
3.25.03.2.03	Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		5 TPI					5 TPI	0 TPI	
3.25.03.2.03.02	Pelayanan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		5 TPI	Pembangunan Rabat Beton 1Paket TPI kec. Ponrang	Penimbunan TPI Batu lotong, pembangunan plat duikker jalan TPI Murante	Penimbunan TPI Batu lotong, pembangunan plat duikker jalan TPI Murante	100	5 TPI	0 TPI	

3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Peningkatan produksi perikanan budidaya								
3.25.04.2.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penerbitan rekomendasi izin Usaha Perikanan dibidang Pembudidaya Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Rekomendasi					1 Rekomendasi	0 Rekomendasi	
3.25.04.2.01.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya,Lokasi,dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang menggunakan Teknologi Sederhana,Semi Intensif,serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah SOP Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Bidang Pembudidaya Ikan yang ditetapkan	1 Dokumen					1 Dokumen	0 Dokumen	
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang difasilitasi untuk mengelola budidaya ikan dengan baik dan benar	68					68	0	
3.25.04.2.04.01	Penyediaan data dan Informasi Pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten /Kota	Jumlah laporan dan Informasi Pembudidayaan ikan			1 Dokumen	1 Dokumen	100			

3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan	Jumlah paket prasarana pembudidayaan ikan yang tersedia bagi kelompok pembudidaya ikan	10 Lokasi	Belanja pemeliharaan saluran irigasi tambak 5 paket, Belanja Modal Jalan Produksi Kawasan Budidaya Air Payau 5 paket	1 paket prasarana budidaya laut ( teripang) pembangunan/rehabilitasi saluran irigasi 2 paket, Sumur bor air tawar untuk hatchery	1 paket prasarana budidaya laut ( teripang) pembangunan/rehabilitasi saluran irigasi 2 paket, Sumur bor air tawar untuk hatchery	100	4 Paket	0 Paket	
3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pokdakan yang Memperoleh Bantuan Sarana Produksi Pembudidayaan Ikan	20 Pokdakan	Bantuan paket percontohan ikan patin 1 paket, Bantuan paket percontohan Budidaya Udang sederhana 1 paket, Bantuan polikultur 6 paket ,Bantuan paket percontohan ikan lele : 6 paket, Bantuan paket percontohan MINAPADI 1 paket, Bantuan paket pecontohan ikan Hias 1 paket	pembangunan /rehabilitasi sarana UPR, 3 Paket sarana budidaya polikultur, 4 paket sarana budidayaikan air tawar, 1 paket sarana budidaya ikan hias air tawar, 1 paket penyediaan bibit calon induk beserta pakan	pembangunan /rehabilitasi sarana UPR, 3 Paket sarana budidaya polikultur, 4 paket sarana budidayaikan air tawar, 1 paket sarana budidaya ikan hias air tawar, 1 paket penyediaan bibit calon induk beserta pakan	100	16 Kelompok	0 Kelompok	
	Jumlah BBI yang terfasilitasi Sarana Pembudidayaan Ikan		700000 Ekor					700000 Ekor	250000 Ekor	35
3. 25. 04.2.04.05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				1 laporan	1 laporan	100			
3.25.04.2.04.07	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat				bangunan air irigasi pekerjaan tanah zona 2 2 paket, pekerjaan zona 4 1 paket, jalan produksi zona 2 1 paket desa wara dan 1 paket desa senga selatan,	bangunan air irigasi pekerjaan zona 4 1 paket, jalan produksi zona 2 1 paket desa wara dan 1 paket desa senga selatan,	60			
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		154 Ton					154 Ton	0 Ton	

3.25.06.	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil									
3.25.06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Laporan dan Informasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan			1 Dokumen	1 Dokumen	100			
3.25.06.2.02	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Kegiatan Gemarikan yang Dilaksanakan	4 Lokasi					4 Lokasi	0 Lokasi	
3.25.06.2.02.01	pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	Jumlah inovasi teknologi produk olahan hasil Kelautan Perikanan Konsumsi dan Non Konsumsi	4 Kegiatan					4 Kegiatan	0 Kegiatan	



## 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERIKANAN KAB. LUWU

### *Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi*

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Nomor 131 Tahun 2016, Dinas Perikanan Kabupaten Luwu mempunyai **Tugas Pokok** membantu Bupati dalam merumuskan konsep sasaran, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan, mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan teknis operasional urusan pemerintahan dibidang perikanan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten.

Dinas perikanan mempunyai **Fungsi** sebagai berikut :

- a. perumusan penyusunan program kegiatan Perikanan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan 20trate;
- c. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dalam kegiatan bawahan;
- d. pengoreksian, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas;
- e. kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. perumusan kebijakan teknis Dinas;
- g. pelaksanaan kebijakan dan administrasi dinas;
- h. penyusunan rencana strategic Dinas;
- i. penyelenggaraan pelayanan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- j. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas seluruh pejabat dan fungsional, serta staf dalam lingkup Dinas;
- k. penyelenggaraan evaluasi dan monitoring program/kegiatan Dinas;
- l. perumusan, penyelenggaraan dan pengarahan rencana strategic dan program kerja dinas yang sesuai dengan visi misi daerah;
- m. pengoordinasian perumusan dan penyusunan program kerja dinas sesuai bidang tugasnya;
- n. penyelenggaraan kebijakan dibidang perikanan yang menjadi kewenangan Daerah yaitu Kesekretariatan, Bidang Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan, Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap, dan Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya;
- o. pembinaan dan pengembangan karir pegawai serta melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sesuai bidang tugasnya maupun dalam rangka kepentingan Pemerintah Daerah;
- p. pelaksanaan pengawasan melekat (Waskat) terhadap pelaksanaan tugas-tugas Dinas;
- q. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada pimpinan/atasan;
- r. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program/kegiatan;

- s. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- t. penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- u. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Daerah terkait dengan bidang Perikanan.

### Permasalahan

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up* dan *top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list ke working plant*.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021, serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2021, dapat dikemukakan beberapa permasalahan Dinas Perikanan dalam menjalankan fungsinya sebagai berikut :

1. Profesionalisme dan kompetensi SDM aparatur dan penyuluh perikanan masih kurang.
2. Pendapatan retribusi daerah yang menjadi kewenangan Dinas Perikanan masih rendah.
3. Peningkatan produksi benih ikan belum konsisten dan berkelanjutan.
4. Tempat Pelelangan Ikan belum berfungsi secara optimal.
5. Pembinaan dan pemberdayaan terhadap pembudidaya ikan dan nelayan masih rendah.
6. SDM dan kelompok pelaku usaha perikanan yang belum mandiri dan berdaya saing.
7. Masih terbatasnya benih bermutu tinggi dikarenakan sulitnya mendapatkan indukan bermutu tinggi dan tahan penyakit dan masih rendahnya perhatian pembudidaya lingkungan, karena umumnya masih menerapkan sistem tradisional dan semi intensive.
8. Sebagian besar Prasarana Pendaratan Ikan belum dapat dioperasikan disebabkan kurangnya fasilitas yang memadai untuk melayani aktivitas Nelayan dalam melaut dan mendaratkan Ikan
9. Kurangnya minat kelompok olahan perikanan untuk mengembangkan usaha yang berkelanjutan
10. Masih minimnya pengetahuan dan keterampilan SDM pengolah dan pemasar

Perangkat Daerah pada hakekatnya melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangan yang diberikan undang-undang sebagai daerah otonom. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan kabupaten/kota di bidang perikanan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.2**  
Kewenangan Kabupaten/Kota pada Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan  
Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014

No.	Sub Urusan	Kewenangan Kabupaten/Kota
(1)	(2)	(3)
1.	Perikanan Tangkap	a. Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota. b. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan(TPI).
2.	Perikanan Budidaya	a. Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1(satu)Daerah kabupaten/kota. b. Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan. c. Pengelolaan pembudidayaan ikan.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa kewenangan yang dilimpahkan kepada kabupaten/kota di seluruh Indonesia di bidang kelautan dan perikanan adalah sangat strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

### 2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan

Uraian pada bagian ini digunakan sebagai alat untuk meng-interpretasi sekurang-kurangnya ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan, pada pelayanan mana saja target telah tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan, pada pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka mempertajam analisis terhadap capaian kinerja, terlebih dahulu disajikan nomenklatur kegiatan perangkat daerah kabupaten/kota sesuai kewenangan tersebut di atas berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020. Untuk Kabupaten Luwu, tidak semua kegiatan yang ditetapkan dalam Permendagri tersebut dapat dilaksanakan karena tidak sesuai dengan kondisi dan potensi daerah. Oleh karena itu, kegiatan yang disajikan adalah kegiatan yang harus dilakukan oleh perangkat daerah sesuai mandatori dan memiliki potensi untuk diselenggarakan di Kabupaten Luwu, yaitu sebagai berikut.

Tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perikanan, dapat dilihat pada Tabel 2.3 sebagai berikut

**Tabel 2.3**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan**  
**Kabupaten Luwu**

**Nama OPD: DINAS PERIKANAN KAB LUWU**

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	12	13
1	Meningkatnya Poduksi Perikanan Budidaya Sebesar 2,5% Per Tahun (Jumlah Produksi Budidaya) (Ton)		IKU	626.653,84	642.320,19	661.589,79	684.745,43	625.825,09	642.320,19	668.205,69	691.592,88	
	Target Daerah Produksi Budidaya (Ton)			626.653,84	642.320,19	661.589,79	684.745,43	648.036,57	642.320,19	661.589,79	684.745,43	
2	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap Sebesar 1% Per Tahun (Jumlah Produksi Tangkap) (TON)		IKU	17.560,37	17.823,77	18.180,25	18.634,75	18.314,50	18.002,01	18.36 2,05	18.816,55	
	Target Daerah Produksi Tangkap (Ton)			17.560,37	17.823,77	18.180,25	18.634,75	17.560,16	17.823,77	18.180,25	18.634,75	
3	Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan Sebesar 1% Per Tahun		IKU	150,55	152,06	153,88	156,19	147,41	153,5806	155,42	157,73	
	Target Daerah Produksi Tangkap (Ton)			150,55	152,06	153,88	156,19	150,55	152,06	153,88	156,19	

## **2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERIKANAN KABUPATEN LUWU**

Dalam menyusun perencanaan dibutuhkan suatu gambaran yang jelas tentang berbagai kondisi daerah. Informasi yang jelas tersebut akan memudahkan bagi organisasi untuk menganalisa factor-faktor internal apa saja yang menjadi kekuatan atau kelemahan dan factor-faktor eksternal apa saja yang menjadi peluang atau tantangan.

Pendekatan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats*) difungsikan untuk melihat kompleksitas permasalahan yang dihadapi Dinas Perikanan Kabupaten Luwu sehingga strategi untuk mengatasi kelemahan dan mengantisipasi ancaman, serta untuk memanfaatkan kekuatan dan peluang guna mencapai tujuan dan sasaran untuk mewujudkan misi dan visi Kepala Daerah Kabupaten Luwu.

### **1. FAKTOR \_ FAKTOR INTERNAL**

#### **KEKUATAN (STRENGTHS)**

- a. Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang cukup besar
- b. Koordinasi dan kerjasama yang baik antar dan intern organisasi serta kebersamaan staf untuk meningkatkan kinerja pemerintahan
- c. Dukungan dana APBN dalam kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan
- d. Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang cukup memadai
- e. Usaha perikanan berkembang dengan cukup baik
- f. Kelompok – kelompok / lembaga masyarakat perikanan yang telah terbentuk dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan perikanan.

#### **KELEMAHAN (WEAKNESSES)**

- a. Terbatasnya sarana dan prasarana umum di bidang kelautan dan perikanan
- b. Terbatasnya teknologi di bidang kelautan dan perikanan
- c. Masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat perikanan
- d. Terbatasnya dana APBD untuk pembangunan perikanan
- e. Kurangnya ketersediaan data dan informasi serta akurasi data di bidang kelautan dan perikanan
- f. Kurangnya permodalan usaha perikanan



## **2. FAKTOR – FAKTOR EKSTERNAL**

### **PELUANG (*OPPORTUNITIES*)**

- a. Adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung pembangunan kelautan dan perikanan
- b. Keberadaan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Pemerintah Pusat
- c. Tersedianya fasilitas kredit lunak dari perbankan dan lembaga keuangan lain
- d. Berkembangnya informasi dan teknologi di bidang perikanan

### **ANCAMAN (*THREATS*)**

- a. Terjadinya deplesi/penurunan stok sumberdaya ikan diperairan pantai
- b. Pengusaan lahan oleh Perhutani
- c. Kurangnya kesadaran untuk menjaga kelestarian lingkungan sumberdaya perikanan
- d. Penggunaan bahan berbahaya dalam usaha pengolahan dan budidaya ikan
- e. Rendahnya daya saing produk perikanan di pasar local maupun global

## **2.4 REVIEW TERHADAP RKPD**

Peta jalan (*road map*) pembangunan jangka panjang baik di tingkat pusat, tingkat provinsi, maupun ditingkat kabupaten/kota sudah disusun dalam dokumen perencanaan jangka panjang, dalam kerangka untuk memperjelas arah pembangunan dalam kurun waktu dua puluh tahun. Pada RPJMPD Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025 juga telah dirancang tema dan prioritas pembangunan daerah dalam bentuk peta jalan (*road map*) yang merupakan implementasi secara tematik arah kebijakan umum pembangunan Kabupaten Luwu Tahun 2005–2025.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integral perencanaan pembangunan nasional. Konsekuensi logisnya adalah bahwa dokumen perencanaan pembangunan di bawah harus mengacu dokumen perencanaan di atasnya. Oleh karena itu pada penyusunan pembangunan daerah Kabupaten Luwu tahun 2023, juga dilakukan sinkronisasi dengan tema dan prioritas pembangunan nasional dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Prioritas pembangunan merupakan dasar dalam menentukan alokasi program/ kegiatan dengan kebutuhan indikatif secara umum untuk mendukung pencapaian target kinerja/ sasaran tema RKPD Tahun 2023, yang selanjutnya menjadi Pedoman Penyusunan dan Anggaran yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2023.

RKPD didasarkan pada analisis kebutuhan setiap Perangkat Daerah. Namun demikian, pada tahap lebih lanjut dilakukan pembahasan dan evaluasi terhadap Renja Perangkat Daerah melalui forum Perangkat Daerah/Forum Gabungan Perangkat Daerah dan musrenbang kabupaten. Mendasar pada masukan-masukan dari berbagai pihak dan juga memperhatikan kemampuan keuangan daerah, kemudian dilakukan penyempurnaan terhadap rancangan RKPD. Dengan banyaknya kebutuhan akan anggaran biaya kegiatan, tidak seluruh rencana kegiatan dapat terakomodir mengingat keterbatasan anggaran yang ada. Oleh karena itu dibuat urutan skala prioritas untuk menentukan urutan program dan kegiatan.

Berdasarkan hasil pencermatan terhadap , hasil Forum Gabungan Perangkat Daerah dan Musrenbang untuk usulan program dan kegiatan Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada Lampiran Tabel 2.4 berikut

**Tabel 2.4**  
**Review terhadap RKPD tahun 2023**  
**Dinas Perikanan Kabupaten Luwu**

Nama OPD: Dinas Perikanan Kab.Luwu

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM ATAU KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM ATAU KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
<b>33.25.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan pemerintahan daerah		<b>Rp 4.654.911.578</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan pemerintahan daerah		<b>Rp 4.654.911.578</b>
<b>3.25.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang disusun		<b>Rp 61.361.300</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang disusun		<b>Rp 61.361.300</b>
3.25.01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen renstra dan renja serta perubahan renstra dan renja yang disusun		Rp 23.439.900	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen renstra dan renja serta perubahan renstra dan renja yang disusun		Rp 23.439.900
3.25.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	2 Dokumen	Rp 5.620.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	2 Dokumen	Rp 5.620.000
3.25.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	Rp 2.079.400	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	Rp 2.079.400
3.25.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	Rp 6.388.700	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	Rp 6.388.700

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM ATAU KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM ATAU KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
3.25.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	Rp 2.475.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	Rp 2.475.000
3.25.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1 Dokumen	Rp 10.100.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1 Dokumen	Rp 10.100.000
3.25.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang disusun	4 Laporan	Rp 11.258.300	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang disusun	4 Laporan	Rp 11.258.300
<b>3.25.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	<b>5 Dokumen</b>	<b>Rp 3.735.527.068</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	<b>5 Dokumen</b>	<b>Rp 3.735.527.068</b>
3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangannya	%	Rp 3.527.087.068	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangannya	%	Rp 3.527.087.068
3.25.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Rp 208.440.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Rp 208.440.000
3.25.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan Semesteran SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan Semesteran SKPD			
<b>3.25.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>522 OB</b>	<b>Rp 12.600.000</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>522 OB</b>	<b>Rp 12.600.000</b>
3.25.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah pelaksana penatausahaan dan pengujian/verifikasi	OB	Rp 12.600.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah pelaksana penatausahaan dan pengujian/verifikasi	OB	Rp 12.600.000

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM ATAU KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM ATAU KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
		keuangan SKPD dalam 1(satu) tahun				keuangan SKPD dalam 1(satu) tahun		
<b>3.25.01.2.04</b>	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan penyelenggaraan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah</b>			<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan penyelenggaraan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah</b>		
3.25.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan retribusi daerah			Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan retribusi daerah		
3.25.01.2.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Profil retribusi daerah kewenangan perangkat daerah			Pengolahan Data Retribusi Daerah	Profil retribusi daerah kewenangan perangkat daerah		
<b>3.25.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Pesentase ASN dengan predikat kinerja baik</b>	<b>Laporan</b>	<b>Rp 42.260.000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Pesentase ASN dengan predikat kinerja baik</b>	<b>Laporan</b>	<b>Rp 42.260.000</b>
3.25.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut ( PDH )		%	Rp 29.040.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut ( PDH )		%	Rp 29.040.000
3.25.01.2.05.02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	OB	Rp 13.220.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	OB	Rp 13.220.000
<b>3.25.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran</b>	<b>%</b>	<b>Rp 475.296.710</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran</b>	<b>%</b>	<b>Rp 475.296.710</b>
3.25.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/peerangan bangunan kantor	Dokumen	Rp 4.548.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/peerangan bangunan kantor	Dokumen	Rp 4.548.000

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM ATAU KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM ATAU KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
3.25.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		
3.25.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	Dokumen	Rp 8.402.950	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	Dokumen	Rp 8.402.950
3.25.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	%	Rp 13.917.720	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	%	Rp 13.917.720
3.25.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	stell/ pasang	Rp 14.400.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	stell/ pasang	Rp 14.400.000
3.25.01..2.06.07	Penyediaan Bahan Material	Jumlah jenis / bahan material kebutuhan kantor yang disediakan	1 orang	Rp 73.016.040	Penyediaan Bahan Material	Jumlah jenis / bahan material kebutuhan kantor yang disediakan	1 orang	Rp 73.016.040
3.25.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	orang	Rp 7.500.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	orang	Rp 7.500.000
3.25.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	orang	Rp 353.512.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	orang	Rp 353.512.000
<b>3.25.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran</b>	<b>%</b>	<b>Rp 99.490.000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran</b>	<b>%</b>	<b>Rp 99.490.000</b>
	Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional Atau Lapangan	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/peerangan	Jenis	Rp 99.490.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional Atau Lapangan	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/peerangan	12 Jenis	Rp 99.490.000



KODE	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM ATAU KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM ATAU KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
		bangunan kantor				bangunan kantor		
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyelenggara penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa	2 Unit	Rp 197.650.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyelenggara penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa	2 Unit	Rp 197.650.000
3.25.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12 bulan	Rp 34.450.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	7 bulan	Rp 34.450.000
3.25.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	3 bulan	Rp 163.200.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	3 bulan	Rp 163.200.000
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 bulan	Rp 30.726.500	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 bulan	Rp 30.726.500
3.25.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	25 bulan	Rp 30.726.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	25 bulan	Rp 30.726.500
3.25.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dilakukan pemeliharaan			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dilakukan pemeliharaan		
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		162 OK	Rp 3.083.966.650	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		162 OK	Rp 3.083.966.650

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM ATAU KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM ATAU KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota			Rp 2.928.991.600	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota			Rp 2.928.991.600
3.25.03.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan				Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan			
3.25.03.2.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap		1 Dokumen	Rp 308.850.000	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap		unit	Rp 308.850.000
3.25.03.2.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap		1 Dokumen	Rp 2.620.141.600	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap		unit	Rp 2.620.141.600
3.25.03.2.02.01	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten		jenis	Rp 117.945.400	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten		jenis	Rp 117.945.400
3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil		m2	Rp 37.103.100	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil		m2	Rp 37.103.100
3.25.03.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil		unit	Rp 43.459.300	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil		unit	Rp 43.459.300
	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha		unit	Rp 37.383.000	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha		unit	Rp 37.383.000

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM ATAU KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM ATAU KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
3.25.03.2.03	Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		%	Rp 37.029.650	Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		%	Rp 37.029.650
3.25.03.2.03.02	Pelayanan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		OB	Rp 37.029.650	Pelayanan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		OB	Rp 37.029.650
			12 Bulan				12 Bulan	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>		<b>864 OB</b>	<b>Rp 3.303.074.800</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>		<b>864 OB</b>	<b>Rp 3.303.074.800</b>
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan Kecil		%	Rp 15.136.500	Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan Kecil		%	Rp 15.136.500
3.25.04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil			Rp 15.136.500	Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil		17 unit	Rp 15.136.500
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang difasilitasi untuk mengelola budidaya ikan dengan baik dan benar		Rp 3.287.938.300	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			Rp 3.287.938.300
3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan	Jumlah paket prasarana pembudidayaan ikan yang tersedia bagi kelompok pembudidaya ikan	10 Lokasi	Rp 875.173.200	Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan		unit/set	Rp 875.173.200
3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pokdakan yang Memperoleh Bantuan Sarana Produksi Pembudidayaan Ikan	20 Pokdakan	Rp 2.399.425.100	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		unit/set	Rp 2.399.425.100

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM ATAU KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM ATAU KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
	Jumlah BBI yang terfasilitasi Sarana Pembudidayaan Ikan		Lokasi	Rp 56.855.000	Jumlah BBI yang terfasilitasi Sarana Pembudidayaan Ikan			Rp 56.855.000
3.25.04.2.04.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten				Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten			
3.25.04.2.04.05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat		m2	Rp 13.340.000	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat		m2	Rp 13.340.000
3.25.04.2.04.06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat				Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat			
3.25.04.2.04.07	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat				Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat			
<b>3.25.06</b>	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>		<b>unit</b>	<b>Rp 55.666.750</b>	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>		<b>unit</b>	<b>Rp 55.666.750</b>
<b>3.25.06.</b>	<b>Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</b>			<b>Rp 15.252.000</b>	<b>Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</b>			<b>Rp 15.252.000</b>
3.25.06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten /Kota	<b>Jumlah Laporan dan Informasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>	Ton	Rp 15.252.000	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten /Kota		Ton	Rp 15.252.000

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM ATAU KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM ATAU KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
3.25.06.2.02	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		1 Dokumen	40.414.750,00	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		1 Dokumen	40.414.750,00
3.25.06.2.02.01	pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	Jumlah inovasi teknologi produk olahan hasil Kelautan Perikanan Konsumsi dan Non Konsumsi	Benih/ekor	40.414.750,00	pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil		Benih/ekor	40.414.750,00
		Jumlah kegiatan promosi yang diikuti dan dilaksanakan				Jumlah kegiatan Gemarikan yang dilaksanakan		
				Rp 11.097.619.778				Rp 11.097.619.778

## 2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam menyusun Program dan Kegiatan, Dinas Perikanan senantiasa membuka diri terhadap saran dan masukan dari para *stekholder* terkait pembangunan sektor perikanan, hal ini dipandang sangat penting dilakukan untuk memperoleh program dan kegiatan yang berkualitas serta tepat sasaran.

Dalam merealisasikan hal tersebut tentunya Dinas Perikanan selalu berpegangan pada peraturan yang berlaku, dalam aturan yang ada terdapat beberapa mekanisme penyerapan Usulan dan masukan Program/kegiatan diantaranya yaitu usulan langsung oleh masyarakat dengan cara berjenjang melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) mulai tingkat terendah sampai tertinggi, melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan mekanisme penyerapan aspirasi langsung oleh anggota DPRD (Reses DPRD) maupun usulan-usulan *Button Up* lainnya seperti permohonan dan Proposal langsung oleh Kelompok Binaan.

Selain itu Dinas Perikanan juga secara aktif melakukan kordinasi kepada instansi lain terkait pembangunan sektor perikanan untuk memperoleh informasi aktual yang relevan terhadap pembangunan Perikanan Kabupaten Luwu.

Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.5 di bawah ini untuk Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Tahun 2023 berikut :

**Tabel 2.5**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023**  
**Kab.Luwu**

Nama OPD : Dinas  
 Perikanan Kab.Luwu

NO	PROGRAM / KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	BESARAN VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>					
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap		jumlah KUB yang yang terjamin sarana usaha perikanan tangkap		
		Pengadaan Kapal/Perahu Mesin 2 GT	Dusun Lare-lare, Dusun Lapadai, Dusun Kmp. baru, Dusun Bunga Tani, Kec. Bua Kab. Luwu		1 Unit	
		Pengadaan Alat Tangkap Perikanan (Jenis Sero)	desa pabbaresseng, Kec. Bua Kab. Luwu		1 Paket	
		Pengadaan Alat Tangkap Perikanan (Jenis Sero)	Desa Pammesakang, Kec. Bua Kab. Luwu		1 Paket	
		Pengadaan Mesin Kapal/Perahu	Desa Pammesakang, Kec. Bua Kab. Luwu		1 Unit	
		Pengadaan Alat Keselamatan Berlayar (Jaket Pelampung)	Desa Tanarigella, Kec. Bua Kab. Luwu		1 Paket	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	BESARAN VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7
		Pengadaan Alat Tangkap Perikanan (Jenis Jaring)	desa pompengan pantai, Kec. Lamasi Timur, Kab. Luwu		1 Paket	
		Pengadaan Alat Tangkap Perikanan (Jenis Jaring)	desa pompengan pantai, Kec. Lamasi Timur, Kab. Luwu		1 Paket	
		Pengadaan Kapal/Perahu Mesin 1 GT	desa pompengan pantai, Kec. Lamasi Timur, Kab. Luwu		1 Unit	
		Pengadaan Kapal/Perahu Mesin 3 GT	Desa Bone Pute, Kec. Larompong Selatan, Kab. Luwu, Kab. Luwu		1 Unit	
		Pengadaan Alat Tangkap Perikanan (Jenis Rumpon)	Desa Bone Pute, Kec. Larompong Selatan, Kab. Luwu, Kab. Luwu		1 Paket	
		Pengadaan Alat Tangkap Perikanan (Jenis Jaring)	Muladimeng, Kec Ponrang Kab. Luwu		1 Paket	
		Pengembangan Sistem logistik ikan koridor sulawesi	Desa Bassiang, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu		1 Paket	
		Pengadaan Alat Tangkap Perikanan (Jenis Sero)	Desa To'bia Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu		1 Paket	
		Pengadaan Alat Tangkap Perikanan (Jenis Jaring)	dusun cimpu,balemping,tirowali,muara utara, Kec. Suli, Kab. Luwu		1 Paket	
		Pengadaan Kapal/Perahu Mesin 2 GT	Kelompok Nelayan Dusun Cerekang, Kec. Suli Kab. Luwu		1 Unit	
		Pengadaan Kapal/Perahu Mesin 1 GT	Lingk. Tangkalasi Kel. Suli, Kec. Suli, Kab. Luwu		1 Unit	
		Pengadaan Kapal/Perahu Mesin 2 GT	Lingk. Tangkalasi Kel. Suli, Kec. Suli, Kab. Luwu		1 Unit	
		Pengadaan Mesin Kapal/Perahu	Lamasi Pantai Kec. Walenrang Selatan Kab. Luwu		1 Unit	



NO	PROGRAM / KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	BESARAN VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7
		Pengadaan Kapal/Perahu Mesin 3 GT	Lamasi Pantai Kec. Walenrang Selatan Kab. Luwu		1 Unit	
		Pengadaan Alat Tangkap Perikanan (Jenis Rumpon)	Lamasi Pantai Kec. Walenrang Selatan Kab. Luwu		1 paket	
		Pengadaan Alat Tangkap Perikanan (Jenis Jaring)	Desa Pangalli, Kec Walenrang Kab. Luwu		1 paket	
		Pengadaan Alat Tangkap Perikanan (Jenis Jaring)	Desa Pangalli, Kec. Walenrang Timur Kab. Luwu		1 Paket	
		Pengadaan Kapal/Perahu < 2 GT	Kelompok Pakkaja Tasi Nelayan Desa Belopa, Kec. Belopa Kab. Luwu		1 unit	
		Pengadaan Kapal/Perahu < 2 GT	Kelompok Pakkaja Tasi Nelayan Desa Belopa Kec. Belopa Kab. Luwu		1 unit	
		Pengadaan Kapal/Perahu < 2 GT	Desa Senga Selatan, Kec. Belopa Kab. Luwu		2 unit	
		Pengadaan Kapal/Perahu < 3 GT	Desa Karang-Karangan, Kec. Bua Kab. Luwu		5 Buah	
		Pengadaan Mesin Perahu	Desa Karang-Karangan, Kec. Bua Kab. Luwu		5 Buah	
		Pengadaan alat tangkap Jaring	Desa Karang-Karangan, Kec. Bua Kab. Luwu		3 Buah	
		Pengadaan alat tangkap sero	Desa Karang-Karangan,Kec. Bua Kab. Luwu		10 Buah	
		Pengadaan Kapal/Perahu < 3 GT	Desa Raja, Kec. Bua Kab. Luwu		5 Buah	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	BESARAN VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7
		Pengadaan Mesin Perahu	Desa Raja, Kec. Bua Kab. Luwu		5 Buah	
		Pengadaan alat tangkap Jaring	Desa Raja, Kec. Bua Kab. Luwu		3 Buah	
		Pengadaan alat tangkap sero	Desa Raja, Kec. Bua Kab. Luwu		10 Buah	
		Pengadaan Kapal/Perahu < 1 GT	Desa Karang-Karangan, Kec. Bua Kab. Luwu		1 UNIT	
		Pengadaan Kapal/Perahu < 1 GT	Desa Borowa, Kec. Bua Kab. Luwu		1 KELOMPOK	
		Pengadaan Kapal/Perahu < 2 GT	Desa Lare-Lare, Kec. Bua Kab. Luwu		1 UNIT	
		Pengadaan alat tangkap sero	Komba, Kec. Larompong Kab. Luwu		2 paket	
		Pengadaan saran penunjang penangkapan ikan Rumpon	Bone Pute, Kec. Larompong Selatan Kab. Luwu		3 unit	
		Pengadaan alat tangkap Jaring	Desa Babang, Kec. Larompong Selatan Kab. Luwu		1 Unit	
		Pengadaan alat tangkap Jaring	Desa Tirowali, Kec. Ponrang Kab. Luwu		1 UNIT	
		Pengadaan Kapal/Perahu < 2 GT	Desa Tirowali, Kec. Ponrang Kab. Luwu		1 PAKET	
		Pengadaan Mesin Perahu	Desa Bassiang Timur, Kec. Ponrang Selatan Kab. Luwu		5 Unit	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	BESARAN VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7
		Pengadaan saran penunjang penangkapan ikan Rumpon	Cimpu, Kec. Suli Kab. Luwu		5 unit	
	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan ( TPI)				
		Pengelolaan/Pembangunan/Rehabilitasi TPI	Lingk. Tangkalasi Kel. Suli, Kec. Suli, Kab. Luwu		1 paket	
		Optimalisasi Pelayanan penyelenggaraan TPI	Desa Lampuara, Kec. Ponrang Selatan Kab. Luwu		1 paket	
		Optimalisasi Pelayanan penyelenggaraan TPI	Larompong Kec. Larompong Kab. Luwu		1 unit	
2	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>					
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pokdakan yang Memperoleh Bantuan Sarana Produksi Pembudidayaan Ikan		
		Pengadaan Bibit Ikan Mas / Mujair	Dusun padang lambe, Kec. Bajo Kab. Luwu		1 Paket	
		Pengadaan Bibit Ikan Mas / Mujair	Desa Marinding, Kec. Bajo Barat Kab. Luwu		1 Paket	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	BESARAN VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7
		Pengadaan Bibit Ikan Lele	Desa Marinding, Kec. Bajo Barat Kab. Luwu		1 Paket	
		Pengadaan Bibit Ikan Mas / Mujair	Desa Sampeang, Kec. Bajo Barat Kab. Luwu		1 Paket	
		Pengadaan Bibit Ikan Lele	Desa Sampeang, Kec. Bajo Barat Kab. Luwu		1 Paket	
		Pengadaan Bibit Ikan Mas / Mujair	Desa Tettekang, Kec. Bajo Barat Kab. Luwu		1 Paket	
		Pengadaan Bibit Ikan Lele	Desa Tettekang, Kec. Bajo Barat Kab. Luwu		1 Paket	
		Pengadaan Bibit Ikan Patin	Desa Tettekang, Kec. Bajo Barat Kab. Luwu		1 Paket	
		Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar (Nila, Gurame, Lele, Patin, Ikan hias dan Sistem Minapadi)	Desa Kanna, Kec. Basse Sangtempe Kab. Luwu		1 Paket	
		Pengembangan prasarana produksi dan pembenihan	Desa kanna, Kec. Basse Sangtempe Kab. Luwu		1 Paket	
		Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar (Nila, Gurame, Lele, Patin, Ikan hias dan Sistem Minapadi)	sinaji, Kec. Basse Sangtempe Kab. Luwu		1 Paket	
		Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar (Nila, Gurame, Lele, Patin, Ikan hias dan Sistem Minapadi)	Desa Barana Semua dusun, Kec. Basse Sangtempe Utara Kab. Luwu		1 Paket	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	BESARAN VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7
		Pengadaan Bibit Ikan Mas / Mujair	Desa Barana Semua dusun, Kec. Basse Sangtempe Utara Kab.Luwu		1 Paket	
		Pengadaan Bibit Ikan Mas / Mujair	Desa Dampan,Kec. Basse Sangtempe Utara Kab.Luwu		1 Paket	
		Sarana Budidaya Laut (Katonik)	Dusun lare-lare, Dusun Lapadia, Dusun Kamp.Baru, Dusun Bunga Tani, Kec. Bua Kab.Luwu		1 Paket	
		Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar (Nila, Gurame, Lele, Patin, Ikan hias dan Sistem Minapadi)	Noling, Kec. Bua Ponrang Kab.Luwu		1 Paket	
		Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar (Nila, Gurame, Lele, Patin, Ikan hias dan Sistem Minapadi)	lingkungan Noling Dan kambuno, Kec. Bua Ponrang Kab.Luwu		1 Paket	
		Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar (Nila, Gurame, Lele, Patin, Ikan hias dan Sistem Minapadi)	Padang Rura,Tampumia,Gantungan, Pollo Salu,Bunne, Kec. Bua Ponrang Kab.Luwu		1 Paket	
		Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar (Nila, Gurame, Lele, Patin, Ikan hias dan Sistem Minapadi)	Se Desa Tanjong, Kec. Bua Ponrang Kab.Luwu		1 Paket	
		Pengadaan Bibit Ikan Mas / Mujair	Dusun Wiwitan Barat, Kec. Lamasi Kab.Luwu		1 Paket	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	BESARAN VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7
		Pengadaan Bibit Ikan Mas / Mujair	DUSUN SENTRAL, Kec. Lamasi Kab.Luwu		1 Paket	
		Pengadaan Bibit Ikan Mas / Mujair	desa pompengan pantai, Kec. Lamasi Timur Kab.Luwu		1 Paket	
		Pengadaan Bibit Udang	desa pompengan pantai, Kec. Lamasi Timur Kab.Luwu		1 Paket	
		Pengadaan Bibit Ikan Mas / Mujair	DESA SALUPAO, Kec. Lamasi Timur Kab.Luwu		1 Paket	
		Pengadaan Bibit Ikan Lele	Desa Boneposi, Kec. Latimojong Kab. Luwu		1 Paket	
		Pengadaan Bibit Ikan Mas / Mujair	Dusun Boneposi,Bungalo,Kumpang,Pebura,Bungadidi,Salubulo, Kec. Latimojong Kab. Luwu		1 Paket	
		Pengadaan Bibit Udang	Dusun Boneposi,Bungalo,Bungadidi,Kumpang,Pebura,Salubulo, Kec. Latimojong Kab. Luwu		1 Paket	
		Pengadaan Bibit Ikan Lele	Dusun Boneposi,Bungalo,Bungadidi,Salubulo,Kumpang,Pebura, Kec. Latimojong Kab. Luwu		1 Paket	
		Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar (Nila, Gurame, Lele, Patin, Ikan hias dan Sistem Minapadi)	Lambanan, Kec. Latimojong Kab. Luwu		1 Paket	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	BESARAN VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7
		Pengadaan Bibit Ikan Lele	Desa Rante Balla, Kec. Latimojong Kab. Luwu		1 Paket	
		Pengadaan Bibit Ikan Mas / Mujair	Desa Rante Balla, Kec. Latimojong Kab. Luwu		1 Paket	
		Pengadaan Bibit Ikan Patin	Desa Rante Balla, Kec. Latimojong Kab. Luwu		1 Paket	
		Pengadaan Bibit Ikan Mas / Mujair	Desa Tabang, Kec. Latimojong Kab. Luwu		1 Paket	
		Pengadaan Bibit Ikan Lele	Desa Tabang, Kec. Latimojong Kab. Luwu		1 Paket	
		Pengadaan Bibit Ikan Mas / Mujair	Dusun Sumbang, Kec. Latimojong Kab. Luwu		1 Paket	
		Pengadaan Bibit Ikan Lele	Dusun sumbang, Kec. Latimojong Kab. Luwu		1 Paket	
		Pengadaan Bibit Ikan Mas / Mujair	Dusun To"Barru, Desa To"Barru, Kec. Latimojong Kab. Luwu		1 Paket	
		Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Payau (Udang/Bandeng/Kepiting)	dusun passapa, Kec. Ponrang Kab. Luwu		1 Paket	
		Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar (Nila, Gurame, Lele, Patin, Ikan hias dan Sistem Minapadi)	Desa Bakti, Kec. Ponrang Selatan Kab. Luwu		1 Paket	
		Pengadaan Bibit Ikan Mas / Mujair	Desa Bakti, Kec. Ponrang Selatan Kab. Luwu		1 Paket	
		Pengadaan Bibit Ikan Patin	Desa Bakti, Kec. Ponrang Selatan Kab. Luwu		1 Paket	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	BESARAN VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7
		Pengembangan prasarana produksi dan pembenihan	Desa Bakti, Kec. Ponrang Selatan Kab. Luwu		1 Paket	
		Pengembangan prasarana produksi dan pembenihan	Desa Bassiang, Kec. Ponrang Selatan Kab. Luwu		1 Paket	
		Sarana Budidaya Air Payau( Udang, Bandeng, Rumput Laut)	desa To"bia, Kec. Ponrang Selatan Kab. Luwu		1 Paket	
		Pengadaan Bibit Ikan Lele	Desa Kaili, Kec. Suli Barat Kab. Luwu		1 Paket	
		Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Payau (Udang/Bandeng/Kepiting)	Lamasi Pantai, Kec. Walenrang Timur Kab. Luwu		1 Paket	
		Sarana Budidaya Air Payau( Udang, Bandeng, Rumput Laut)	Lamasi Pantai, Kec. Walenrang Timur Kab. Luwu		1 Paket	
		Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar (Nila, Gurame, Lele, Patin, Ikan hias dan Sistem Minapadi)	Desa Pangalli, Kec. Walenrang Timur Kab. Luwu		1 Paket	
		Pengadaan Bibit Ikan Mas / Mujair	Desa Pangalli, Kec. Walenrang Timur Kab. Luwu		1 Paket	
		Pengadaan Bibit Ikan Lele	Desa Pangalli, Kec. Walenrang Timur Kab. Luwu		1 Paket	
		Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Payau (Udang/Bandeng/Kepiting)	seba-seba timur, Kec. Walenrang Timur Kab. Luwu		1 Paket	
		Sarana Budidaya Air Payau( Udang, Bandeng, Rumput Laut)	seba-seba timur, Kec. Walenrang Timur Kab. Luwu		1 Paket	



NO	PROGRAM / KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	BESARAN VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7
		Pengadaan Bibit Ikan Mas / Mujair	Dusun Lummi, Dusun Sanrekomai, Dusun To"Bakkun, dan Dusun Borai, Kec. Walenrang Utara Kab. Luwu		1 Paket	
		Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar (Nila, Gurame, Lele, Patin, Ikan hias dan Sistem Minapadi)	Desa Rumaju, Kec. Bajo Kab. Luwu		50 kelompok	
		Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar (Nila, Gurame, Lele, Patin, Ikan hias dan Sistem Minapadi)	Desa Bajo Barat,Kec. Bajo Barat Kab. Luwu		5 PAKET	
		Sarana Budidaya Laut (Katonik)	Desa Toddopuli,Kec. Bua Kab.Luwu		3 Buah	
		Sarana Budidaya Laut (Katonik)	Desa Lare-Lare, Kec. Bua Kab.Luwu		2 KELOMPOK	
		Sarana Budidaya Laut (Katonik)	Desa Lare-Lare,Kec. Bua Ponrang Kab.Luwu		2 PAKET	
		Sarana Budidaya Laut (Katonik)	Desa Buntu Kamiri, Kec. Ponrang Kab.Luwu		2 PAKET	
		Sarana Budidaya Laut (Katonik)	Desa Mario, Kec. Ponrang Kab.Luwu		2 PAKET	
		Sarana Budidaya Laut (Katonik)	Desa Tirowali, Kec. Ponrang Kab.Luwu		4 PAKET	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	BESARAN VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7
		Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Payau (Udang/Bandeng/Kepiting	Desa To"Bia - Desa To"Balo, Kec. Ponrang Selatan Kab.Luwu		1 paket	
		Sarana Budidaya Laut (Katonik)	Desa Karang-Karangan, Kab. Luwu		2 PAKET	
		Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Payau (Udang/Bandeng/Kepiting	Desa To"Bia, Kab. Luwu		1000000 Ekor	
		Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar (Nila, Gurame, Lele, Patin, Ikan hias dan Sistem Minapadi)	Dusun Bolu, Kab. Luwu		5000 EKOR	
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah paket prasarana pembudidayaan ikan yang tersedia bagi kelompok pembudidaya ikan		
		Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak	Dusun Tokatapang, Kec.Kamanre Kab Luwu		1 Paket	
		Pembangunan Jalan Produksi Tambak	Dusun Kou, Kec. Larompong Selatan Kab. Luwu		1 Paket	
		Pembangunan Jalan Produksi Tambak	Dusun Sao Rajae, Kec. Ponrang Kab. Luwu		1 Paket	
		Pemeliharaan Bangunan Air irigasi	Lingk. tangkalasi Kel. Suli, Kec. Suli Kab. Luwu		1 Paket	
		Pemeliharaan Bangunan Air irigasi	Dusun Tampumia, Padang Rura, Kec. Bua Ponrang Kab.Luwu		1 Paket	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	BESARAN VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7
		Pemeliharaan Bangunan Air irigasi	dusun bulo, Kec. Basse Sangtempe Utara Kab.Luwu		1 Paket	
		Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak	Desa Pabbaresseng, Kec. Bua Kab.Luwu		1 Paket	
		Pembangunan Jalan Produksi Tambak	Lamasi Pantai, Kec. Walenrang Timur Kab. Luwu		1 Paket	
		Pemeliharaan Bangunan Air irigasi	Kec. Bua Kab.Luwu		2000 meter	
		Pemeliharaan Bangunan Air irigasi	Kec. Bua Kab.Luwu		2000 meter	
		Pemeliharaan Bangunan Air irigasi	Kec. Bua Kab.Luwu		2000 meter	
		Pemeliharaan Bangunan Air irigasi	Bua, Kab. Luwu		250 meter	
		Pemeliharaan Bangunan Air irigasi	Desa To"Bia, Kec. Ponrang Selatan Kab.Luwu		2000 Meter	

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

**Pendekatan** penyusunan Pemerintah Tahun 2021 dilakukan dengan Perkuatan Pelaksanaan Kebijakan *Money Follow Program*. Penguatan tersebut dilaksanakan dengan pendekatan *Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial* dengan memperhatikan pada:

- a. Pengendalian perencanaan
- b. Perkuatan perencanaan dan penganggaran untuk RKP 2023
- c. Perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan
- d. Perkuatan integrasi sumber pendanaan

Dengan penjelasan sebagai berikut :

*Tematik* berarti penekanan atau fokus pada perencanaan sampai dengan program prioritas.

*Holistik* pendekatan menyeluruh dan komprehensif dari hulu sampai hilir.

*Integratif* yang berarti integrasi dalam siapa berbuat apa dan integrasi sumber pendanaan.

*Spasial* keterkaitan fungsi lokasi dari berbagai kegiatan yang terintegrasi.

Perkuatan Money Follow Program pada RKP 2023 diarahkan kepada :

- a. Menajamkan Prioritas Nasional
- b. Memastikan pelaksanaan program
- c. Menajamkan integrasi sumber pendanaan

Pembangunan perikanan di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 – 2019 didasarkan kepada Visi :

**“Sulawesi Selatan yang inovatif, produktif, kompetitif, inklusif, dan berkarakter”** untuk mewujudkan visi tersebut maka dengan Misi yang diamanahkan pada Pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan adalah Ke-5 yaitu meningkatkan produktifitas dan daya saing produk sumberdaya alam yang berkelanjutan.

#### 3.2 TUJUAN DAN SASARAN Renja OPD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang

ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dinas Perikanan sesuai dengan tugas pokoknya membantu bupati melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang perikanan. Untuk itu berdasarkan visi dan misi yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Luwu 2019 – 2024 serta sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Tahun 2019 – 2024, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1**

**Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perikanan  
Kabupaten Luwu Tahun 2023**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja
Meningkatkan perekonomian daerah di sektor perikanan	Kontribusi subsektor perikanan terhadap PDRB	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat penilaian implementasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten	79,02 (B)
		Meningkatkan produktivitas perikanan	Presentase peningkatan produksi perikanan tangkap	2,50 - 4,50
			Presentase peningkatan produksi perikanan budidaya	3,00 - 4,99
		Meningkatkan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Presentase pertumbuhan IKM pengolahan hasil perikanan	1,00
			Presentase pertumbuhan IKM pemasaran hasil olahan perikanan	1,00

### 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Luwu, pada dasarnya kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu adalah sebagai “*pengarah*” setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi SKPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.

Sejalan dengan visi Kabupaten Luwu Tahun 2019 – 2024 yaitu : ***”Luwu Sebagai Daerah Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera Dalam Nuansa Religi”*** dan sesuai dengan Misi ke 4 Kabupaten Luwu yaitu : ***”Pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan koperasi, usaha mikro kecil menengah dan perluasan lapangan kerja”***, maka penyusunan Rencana Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Tahun 2023 dilakukan dengan menjabarkan visi, misi dan arah kebijakan Bupati Luwu ke dalam serangkaian rencana tindakan yang akan diimplementasikan untuk mencapai kondisi yang akan dicapai pada akhir tahun perencanaan dengan memperhatikan kondisi sumberdaya kelautan dan perikanan saat ini. Sedangkan pelaksanaan untuk mencapai sasaran adalah melalui kegiatan kegiatan sebagaimana yang terurai dibawah ini.

**Tabel 3.2**

**Tabel Program Utamadan Kegiatan  
Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Tahun 2023**

No.	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah,</li> <li>- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD,</li> <li>- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD,</li> <li>- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</li> <li>- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD</li> <li>- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</li> <li>-</li> </ul>
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN,</li> <li>- Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</li> <li>- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan Semesteran SKPD</li> </ul>
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</li> </ul>
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah</li> <li>- Pengolahan Data Retribusi Daerah</li> <li>-</li> </ul>
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</li> <li>- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan</li> </ul>

No.	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		Tugas dan Fungsi - Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan - Perundang-Undangan
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Penyediaan Bahan Material Fasilitas Kunjungan Tamu - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan - Konsultasi SKPD -
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Pengadaan Mebel - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat, - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Mebel - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan - Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan

No.	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya -
2	<b>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	
	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan,</li> <li>- Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap,</li> <li>- Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap</li> </ul>
	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil,</li> <li>- Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil, Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan,</li> <li>- Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha</li> </ul>
	Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI),</li> <li>- Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)</li> </ul>
3	<b>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>	
	Penerbitan Izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing</li> </ul>
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil</li> <li>- Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil</li> <li>- Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha Pemberian Pendampingan, Kemudahanan</li> <li>- Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan</li> </ul>
	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah</li> </ul>



No.	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		Kabupaten/Kota - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Penjaminan Ketersediaan Sarana - Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan - Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat - Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan - Ikan di Darat Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat -
4	<b>Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>	
	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	- Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten /Kota
	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	- Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	- Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten - Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

## **BAB IV**

### **Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

#### **1.1 Rencana Kerja**

Rencana Kerja Merupakan Dokumen Rencana yang memuat Program dan Kegiatan yang di perlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, Adapun Jumlah program yang di rencanakan untuk tahun Anggaran 2023 Sebanyak 4 program 16 kegiatan 44 sub kegiatan, Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan tetap mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan.

#### **1.2 Pendanaan Perangkat Daerah**

Untuk tercapainya target dari setiap indikator kinerja dibutuhkan pendanaan untuk membiayai masing-masing kegiatan, kebutuhan pendanaan tahun anggaran 2023 pada Dinas Perikanan direncanakan sebesar **Rp.11.097.619.778** yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 dapat dilihat padatabel 4.1 sesuai lampiran berikut :

**TABEL 4.1**  
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**DINAS PERIKANAN**  
**TAHUN 2023 dan PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023**

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM ATAU KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
33.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan pemerintahan daerah			Rp 4.654.911.578,00				Rp 5.434.982.679,00
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang disusun		9 Dokumen	Rp 61.361.300,00			9 Dokumen	Rp 72.769.150,00
3.25.01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen renstra dan renja serta perubahan renstra dan renja yang disusun		9 Dokumen	Rp 23.439.900,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9 Dokumen	Rp 25.230.000,00
3.25.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun	Kab. Luwu	1 Dokumen	Rp 5.620.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	Rp 7.040.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM ATAU KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
3.25.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun	Kab. Luwu	1 Dokumen	Rp 2.079.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	Rp 4.040.200,00
3.25.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun	Kab. Luwu	1 Dokumen	Rp 6.388.700,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	Rp 8.388.700,00
3.25.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	Kab. Luwu	1 Dokumen	Rp 2.475.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	Rp 2.650.250,00
3.25.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Kab. Luwu	1 Dokumen	Rp 10.100.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	Rp 12.210.000,00
3.25.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang disusun	Kab. Luwu	1 Dokumen	Rp 11.258.300,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	Rp 13.210.000,00
<b>3.25.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	<b>Kab. Luwu</b>	<b>5 Dokumen</b>	<b>Rp 3.735.527.068,00</b>	<b>DAU</b>		<b>5 Dokumen</b>	<b>Rp 3.735.527.068,00</b>
3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangannya	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua	56 Orang/bulan	Rp 3.527.087.068,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		56 Orang/bulan	Rp 3.999.697.539,00
3.25.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Kab. Luwu, Semua	1087 Dokumen	Rp 208.440.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1087 Dokumen	Rp 350.440.000,00
<b>3.25.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat</b>			100 persen	<b>Rp 12.600.000,00</b>			100 persen	<b>Rp 14.000.000,00</b>

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM ATAU KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
	Daerah								
3.25.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah pelaksana penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD dalam 1(satu) tahun	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua	2 Laporan	Rp 12.600.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	Rp 14.000.000,00
3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pesentase ASN dengan predikat kinerja baik		100 persen	Rp 42.260.000,00			100 persen	Rp 55.220.000,00
3.25.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut ( PDH )		Kab. Luwu, Semua	44 Orang/bulan	Rp 29.040.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		44 Orang/bulan	Rp 40.000.000,00
3.25.01.2.05.02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Kab. Luwu, Semua	2 Orang	Rp 13.220.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Orang	Rp 15.220.000,00
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran		100 persen	Rp 475.296.710,00			100 persen	Rp 582.705.990,00
3.25.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/peerangan bangunan kantor	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua	11 jenis	Rp 4.548.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		11 jenis	Rp 6.545.000,00
3.25.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua	12 Bulan	Rp 8.402.950,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	Rp 10.402.950,00
3.25.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	12 Bulan	Rp 13.917.720,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	Rp 16.400.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM ATAU KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
3.25.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Semua Kab/Kota, Semua	1 jenis	Rp 14.400.000,00			1 jenis	Rp 16.400.000,00
3.25.01..2.06.07	Penyediaan Bahan Material	Jumlah jenis / bahan material kebutuhan kantor yang disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	12 Bulan	Rp 73.016.040,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan	Rp 75.016.040,00
3.25.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	300 Orang/Kali	Rp 7.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		300 Orang/Kali	Rp 8.500.000,00
3.25.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	Semua Kab/Kota, Semua	500 Orang/Kali	Rp 353.512.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		500 Orang/Kali	Rp 355.512.000,00
3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran		3 Unit	Rp 99.490.000,00			3 Unit	Rp 110.000.000,00
	Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional Atau Lapangan	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/peerangan bangunan kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	3 Unit	Rp 99.490.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Unit	Rp 100.000.000,00
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyelenggara penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa		100 persen	Rp 197.650.000,00			100 persen	Rp 201.750.000,00
3.25.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	Kab. Luwu, Semua	1 dokumen	Rp 34.450.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	Rp 36.550.000,00
3.25.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua	1 dokumen	Rp 163.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	Rp 165.200.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM ATAU KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 persen	Rp 30.726.500,00			100 persen	Rp 48.400.000,00
3.25.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	Kab. Luwu, Semua	4 Unit	Rp 30.726.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Unit	Rp 40.400.000,00
3.25.03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>			1863475 0	Rp 3.083.966.650,00			1863475 0	Rp 3.665.145.400,00
3.25.03.2.01	<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>			1 Dokumen	Rp 2.928.991.600,00			1 Dokumen	Rp 3.120.850.000,00
3.25.03.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan			100 persen				100 persen	
3.25.03.2.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap		Kab. Luwu, Semua	1 Paket	Rp 308.850.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	Rp 310.850.000,00
3.25.03.2.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap		Kab. Luwu, Semua	66 Unit/paket	Rp 2.620.141.600,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		66 Unit/paket	Rp 2.810.000.000,00
3.25.03.2.02.01	<b>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten</b>			100 persen	Rp 117.945.400,00			100 persen	Rp 123.945.400,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM ATAU KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil		Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua	11 klp	Rp 37.103.100,00			11 klp	Rp 39.103.100,00
3.25.03.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil		Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua	66 Kelompok	Rp 43.459.300,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		66 Kelompok	Rp 45.459.300,00
	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan,Kemitraan Usaha		Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua	11 klp	Rp 37.383.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		11 klp	Rp 39.383.000,00
<b>3.25.03.2.03</b>	<b>Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)</b>			60 OB	<b>Rp 37.029.650,00</b>			60 OB	<b>Rp 406.350.000,00</b>
3.25.03.2.03.02	Pelayanan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		Kab. Luwu, Semua	4 Layanan	Rp 37.029.650,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Layanan	Rp 406.350.000,00
				4 TPI				4 TPI	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>			684745,43 Ton	<b>Rp 3.303.074.800,00</b>		684745,43 Ton	<b>3.614.027.200</b>	<b>Rp 4.708.074.800,00</b>
<b>3.25.04.2.02</b>	<b>Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan Kecil</b>			100 persen	<b>Rp 15.136.500,00</b>		100 persen	<b>20.000.000</b>	<b>Rp 4.708.074.800,00</b>



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM ATAU KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
3.25.04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil		Kab. Luwu, Semua	4 Kelompok	Rp 15.136.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Kelompok	20.000.000	Rp 15.136.500,00
<b>3.25.04.2.04</b>	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>			100 persen	<b>Rp 3.287.938.300,00</b>		100 persen	<b>3.590.477.200</b>	
3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	5 Unit/paket	Rp 875.173.200,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Unit/paket	895.137.200	Rp 1.725.173.200,00
3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Kab. Luwu, Semua	55 Unit/paket	Rp 2.399.425.100,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	55 Unit/paket	2.655.000.000	Rp 2.954.425.100,00
3. 25. 04.2.04.05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat		Kab. Luwu, Semua	55 Klp	Rp 13.340.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	55 Klp	15.340.000	Rp 13.340.000,00
<b>3.25.06</b>	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>		<b>Kab. Luwu</b>	4 Lokasi	<b>Rp 55.666.750,00</b>			<b>unit</b>	<b>Rp 55.666.750,00</b>
<b>3.25.06.</b>	<b>Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</b>				<b>Rp 15.252.000,00</b>				<b>Rp 15.252.000,00</b>

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM ATAU KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
3.25.06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten /Kota			4 Lokasi	Rp 15.252.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rp 15.252.000,00
3.25.06.2.02	<b>Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</b>		<b>Kab. Luwu</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>Rp 40.414.750,00</b>			<b>Kelompok</b>	<b>Rp 40.414.750,00</b>
3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Inovasi Teknologi Produk Olahan Hasil Kelautan Perikanan Konsumsi dan Non Komsumsi	Kab. Luwu	4 Jenis Produk	Rp 40.414.750,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Kegiatan	Rp 40.414.750,00
		Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran							
					Rp 11.097.619.778,00				Rp 12.773.822.029,00

## **BAB V**

### **PENUTUP**

(Rencana Kerja) Renja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan pemerintahan yang bersih sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya dapat dirasakan sampai ke bawah (*trickle down effect*), sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Penyusunan Dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Dinas Perikanan didasarkan pada kondisi dan potensi sumberdaya Perikanan serta tingkat perkembangan yang ingin dicapai pada tahun 2023. Penyusunan Renja melalui proses analisis lingkungan Dinas Perikanan baik lingkungan internal maupun eksternal menggunakan strategi analisis SWOT yaitu dengan memperhitungkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*) untuk perwujudan visi dan misi Kabupaten Luwu.

(Rencana Kerja) Renja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Perikanan. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023, Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Perikanan Kabupaten Luwu. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Perikanan Kabupaten Luwu sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Dengan disusunnya Renja Tahun 2023 Dinas Perikanan Kabupaten Luwu diharapkan berguna sebagai arah, pedoman dan landasan Dinas Perikanan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan. Selain itu Renja ini juga dijadikan pedoman bagi semua pihak yang terkait dalam perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan dan kelestarian sumberdaya Kelautan dan Perikanan secara optimal berkelanjutan, demi terwujudnya masyarakat Perikanan yang berdaya, sejahtera dan berwawasan lingkungan.

Demikian ini disusun dengan harapan dapat dianalisis dan dipertimbangkan penguangannya dalam R-APBD Tahun Anggaran 2023.



**DINAS PERIKANAN KABUPATEN LUWU**  
**Jalan Andi Djemma 1**  
**Kompleks Perkantoran Pemkab luwu, Belopa 91994**  
**Telp/Fax : 0471-331-4508**  
**Email : KelautanperikananLuwu@gmail.com**